

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010:3) koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Menurut Santyaminah 2012 koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong – menolong. Semangat tolong – menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang untuk semua dan semua untuk orang.

Sehingga dapat disimpulkan koperasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu membangun perekonomian dan kesejahteraan bersama dengan mendirikan sebuah badan usaha yang dikelola bersama – sama.

2.1.2 Prinsip Dasar Koperasi

Menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, prinsip dasar koperasi adalah

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk membangun berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. Dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya.

2.1.3 Pengertian Piutang

Pada koperasi simpan pinjam, kegiatan utamanya memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang modalnya berasal dari simpanan dana anggotanya. Karena kegiatan inilah akan menimbulkan piutang anggota (piutang simpan pinjam). Menurut Rudianto (2010 :17): “Piutang anggota adalah hak (tagihan) koperasi kepada anggota koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi meminjamkan uang

kepada anggotanya atau karena koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit “.

Pada perusahaan biasanya melakukan kegiatan penjualan secara tunai dan kredit. Apabila penjualan dilakukan secara kredit maka akan muncul perkiraan piutang, yang merupakan hak perusahaan untuk menuntut pembayarannya atas penjualan barang/jasa kepada konsumennya. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai piutang. Menurut Baridwan (2013:2014), “Piutang dagang (piutang usaha) menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang – barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan menurut Mardiasmoya (2016 :51) , “ Piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit”.Dan menurut Efraim (2012 : 129), “ Piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa (aset) tertentu pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini”.

Merujuk pada pengertian para ahli yang telah dikemukakan mak dapat disimpulkan bahwa piutang adalah suatu tagihan (klaim) perusahaan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan baik perorangan maupun kelompok (badan usaha) yang ditimbulkan oleh penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan operasional perusahaan.

2.1.4 Jenis – jenis Piutang

Pada koperasi, terdapat begitu banyak jenis piutang yang dimiliki. Menurut Rudianto (2010: 145), piutang dalam koperasi dapat di golongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis dan asalnya yaitu:

1. Piutang Anggota

Piutang Anggota adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Pada kegiatan normal koperasi, piutang anggota biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang anggota dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

2. Piutang Bukan Anggota

Piutang bukan anggota adalah piutang yang timbul akibat koperasimelakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. Piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk koperasi. sementara piutang bukan usaha adalah piutang yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi. termasuk dalam kedua kelompok ini adalah:

- a. Persekot dalam kontrak pembelian
- b. Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau Hilang
- c. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan.

- d. Klaim terhadap karyawan koperasi
- e. Klaim terhadap restitusi pajak
- f. Piutang Dagang

3. Piutang Karyawan

Piutang karyawan adalah tagihan koperasi kepada karyawan koperasi. Biasanya pembayaran piutang karyawan dilakukan melalui pemotongan gaji pada bulan berikutnya

2.1.5 Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan piutang dagang menurut Kieso (2008:348) yaitu: Sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang dari debitor (seorang pelanggan atau peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya berupa faktur (*invoice*).

Sedangkan menurut Skousen (2009:412) pengakuan piutang usaha yaitu: Pengakuan pendapatan pada umumnya berhubungan dengan pengakuan piutang usaha. Oleh karena pendapatan umumnya dicatat ketika proses menghasilkan selesai dan janji pembayaran yang valid

(atau pembayaran itu sendiri) diterima, maka selanjutnya piutang usaha yang timbul dari penjualan barang secara umum ketika kepemilikan barang dialihkan ke pembeli yang terpercaya.

Tabel 2.1

Jurnal Pengakuan Piutang

Keterangan	Jurnal	
Ayat Jurnal untuk mengakui piutang atas penjualan barang atau jasa	Piutang Dagang Penjualan	Rp. xxx Rp. xxx
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran piutang dengan mendapatkan diskon	Kas Diskon Penjualan Piutang Dagang	Rp. xxx Rp. xxx Rp. Xxx
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran piutang tanpa mendapatkan diskon.	Kas Piutang dagang	Rp. Xxx Rp. xxx

Sumber : Data yang diolah, 2016

Pengakuan piutang simpan pinjam dalam koperasi terjadi jika koperasi memberikan pinjaman kepada anggota koperasi sehingga koperasi memiliki hak klaim kepada anggota tersebut. Pengakuan piutang simpan pinjam menurut Rudianto (2010: 126) adalah piutang simpan pinjam diakui sebesar jumlah bruto (nilai jatuh tempo).

Tabel 2.2
Jurnal Pengakuan Piutang Simpan Pinjam

Keterangan	Jurnal	
Ayat jurnal untuk mengakui piutang simpan pinjam	Piutang anggota Kas	Rp xxx Rp. xxx
Ayat jurnal pada saat pembayaran piutang simpan pinjam dengan bunga	Kas Piutang anggota Pendapatan bunga	Rp xxx Rp xxx Rp. xxx

Sumber : Rudianto (2010:126)

2.1.6 Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang dan harus dicatat agar jumlah yang harus disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang dagang dan piutang wesel, karena keduanya sering dijumpai dalam suatu perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. Dengan adanya pengukuran piutang tersebut maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang yang bersangkutan.

Hery (2009:270) mengemukakan, akun piutang usaha pertama kali akan timbul karena penjualan barang secara kredit, yang kemudian dapat diikuti dengan transaksi return penjualan, penyesuaian dan pengurangan harga jual dan pada akhirnya penagihan. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan jika ada transaksi penjualan secara kredit sebesar xxxx :

Piutang Usaha	xxxx	
	Penjualan	xxxx

Jika transaksi penjualan tersebut ada potongan, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan saat pembayaran adalah :

Kas	xxxx	
Potongan Penjualan	xxxx	
	Piutang Usaha	xxxx

2.1.7 Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.

Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang.
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada

Khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan agar lebih informative. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar

pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

2.1.8 Penyajian Piutang dan Pelaporan

Penentuan jumlah piutang yang akan dilaporkan dineraca sebagai aktiva adalah penting karena sejumlah piutang kadangkala tidak dapat ditagih atau dilunasi oleh pelanggan, agar piutang tidak dinilai terlalu tinggi (*overstated*) pada neraca, piutang tersebut disajikan pada nilai realisasi bersih. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 menyatakan bahwa “Piutang disajikan pada pos aset lancar sebesar nilai bersih piutang, yaitu nilai saldo piutang usaha dikurangi dengan taksiran kemungkinan tidak tertagihnya piutang (cadangan kerugian piutang)”.

Martani dkk (2014:226) menyatakan bahwa piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Nilai piutang disajikan di laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. Jika disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Skousen (2009:417): “Semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa mendatang”. Berdasarkan teori dari di atas, piutang dilaporkan berdasarkan nilai yang diterima dari

piutang tersebut. Pada konsep penilaian ini menunjukkan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima dari masa yang akan datang. Meskipun piutang telah dinilai sebesar nilai bersihnya dikurangi dengan 15 cadangan kerugian piutang) namun kedua jumlah tersebut harus disajikan sebesar nilai transaksi yang sebenarnya dalam neraca dan cadangan kerugian piutang disajikan sebagai pengurang dari saldo piutang usaha untuk mendapatkan nilai bersih piutang yang akan terealisasi.

Menurut Mardiasmo (2016 :63), Pelaporan piutang seharusnya dilakukan yaitu : Penyajian piutang dagang di dalam laporan posisi keuangan dipisahkan dengan pos-pos piutang yang lain. Contoh penyajian piutang dagang dalam laporan posisi keuangan :

Piutang usaha (bruto)	Rp xxx
Dikurangi: Cadangan kerugian piutang	<u>(Rp xxx)</u>
Piutang usaha (netto)	Rp xxx

2.1.9 Metode Pencatatan Piutang

Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini:

1. Metode Konvensional,

- a) Dalam metode ini posting kedalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah:

Transaksi Penjualan Kredit, transaksi ini di posting dalam kartu

piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut.

- b) Transaksi retur penjualan, posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan di posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah di catat dalam jurnal retur penjualan.
- c) Transaksi penerimaan kas dari piutang, posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur di posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum.
- d) Transaksi penghapusan piutang, transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang di posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum.

2. Posting langsung kedalam kartu piutang dan pernyataan piutang.

Metode posting langsung ini dibagi menjadi dua golongan berikut ini

- a) Metode Posting Harian:

Posting langsung kedalam kartu piutang dengan tulisan tangan; jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja (tidak rinci).

Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang di posting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi

dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total (pre-list tape).

Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan, jurnal penjualan tersebut di posting ke rekening kontrolpiutang dalam buku besar. Setiapbulan pula, diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar sald (trial balance) yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting kedalam kartu piutang:

1. Media disortasi menurut abjad sebelum diposting, di posting satu per satu kedalam kartu piutang, dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan.
2. Media di posting kedalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan.

b) Metode Posting Periodik:

1. Posting Ditunda. Pada metode ini faktur penjualan yang diterima dari bagian penaggihan, oleh bagian piutang

disimpan sementara, menunggu beberapa hari, untuk nantinya secara sekaligus di posting kedalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan.

2. Penagihan Bersiklus (*Cycle Billing*). Dalam metode ini pada akhir bulan, dilakukan kegiatan posting yang meliputi :

a) posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut kedalam pernyataan piutang dan kartu piutang.

b) Mencatat dan menghitung saldo kartu piutang.. metode ini membagi pekerjaan posting kedalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata kedalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan.

Dalam metode ini, media di posting kedalam pernyataan piutang dengan kartu piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang.

3. Metode Pencatatan Tanpa Buku Pembantu (*ledgerless bookeping*)

Dalam metode ini Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan, oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur

yang belum bayar (unpaid invoice file). Pada saat diterima pembayarannya ada dua cara yang ditempuh:

- a) Jika pelanggan pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan di ambil dari arsip faktur yang belum di bayar dan di cap “lunas”, kemudian dipindahkan kedalam arsip faktur yang telah dibayar.
- b) Jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalma faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya, dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar, dan faktur asli disimpan kembali kedalam arsip faktur yang belum dibayar.

4. Metode Pencatatan Piutang Dengan Komputer

Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus di posting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. dalam sistem ini dibentuk dua macam arsip: arsip transaksi (*transaction file*) dan arsip induk (*master file*) dan pencatatan piutangnya dilakukan secara harian dan setiap hari pula, arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang.

2.2.0 SAK ETAP

Standar pelaporan tersebut telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada bulan Mei 2009 dan SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Analisis penerapan SAK ETAP pada koperasi di Universitas Pasir Pengaraian 100 Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 2 Juli 2016 Mackenzie (2012) menyebutkan “Entitas yang termasuk dalam ETAP adalah agen perjalanan agen real estate, sekolah, organisasi sosial, entitas koperasi yang mengharuskan iuran keanggotaan, dan penjual yang menerima pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa misalnya perusahaan jasa”.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik diperbolehkan menggunakan SAK ETAP jika ada otorisasi yang berwenang membuat regulasi yang menyatakan mengizinkan penggunaan SAK ETAP kepadanya. Menurut SAK ETAP (2009) “Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP”. Pemahaman terhadap SAK ETAP sangat diperlukan sebelum melaksanakan pelaporan keuangan yang berdasarkan kepadanya. Jika tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai maka kualitas dari laporan keuangan tersebut akan menjadi diragukan. Menurut Indra Wijaya Kusuma (2007) “pengalaman adopsi IFRS di Negara berkembang menunjukkan umumnya kesulitan terletak pada kesiapan

profesi dan pendidikan akuntansi”. Pentingnya pengetahuan yang baik terhadap SAK-ETAP sebelum diterapkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus diutamakan. Jika kekurangan pengetahuan akan mengakibatkan mengganggu kualitas laporan dan ketepatan waktu pelaporan, dan akan menurunkan kemampuan bersang entitas yang berkaitan dalam dunia usaha.

1. SAK ETAP Pengakuan Piutang Usaha (SAK ETAP Bab 2 Nomor 14)

Sesuai dengan SAK ETAP (2.24) bahwa pengukuran unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas,
- b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. SAK ETAP Penyajian dan Pelaporan Keuangan (SAK ETAP Bab 3 Nomor 1-17)

Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisist dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatn laporan keuangan, terdiri dari :

- a) Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban.

Penyajian wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan keuangan. Entitas harus menilai kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan. Entitas menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun. Informasi komparatif dengan periode sebelumnya dengan keunggulan yang sama. Pos-pos yang material disajikan terpisah.

b) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

c) Kelangsungan Usaha

Pada saat penyusunan laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya.

d) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimum satu tahun sekali.

e) Konsistensi penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos harus konsisten. Kecuali:

1. Terjadi perubahan signifikan operasi entitas atau perubahan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih andal dan relevan.
2. SAK ETAP mensyaratkan perubahan penyajian
3. Reklasifikasi harus dilakukan retrospektif, kecuali tidak praktis dapat secara prospektif
4. Jika prospektif : diungkapkan sifat reklasifikasi dan jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya.

f) Informasi komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan perioda sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan)

g) Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam memncatat suatu pos dianggap material jika, baik secraa individu maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

h) Identifikasi laporan keuanga lengkap

Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian tedahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizka Ariyanti, Sri Murniati (Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol.16 tahun 2019)	Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK ETAP no.15 pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan	Hasil analisis dari koperasi Karyawan PT. Pisma Putra Textile belum sepenuhnya menerapkan pengakuan, pencatatan, dan penyajian aset tetap koperasi sesuai standar akuntansi yang berlaku, mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan cara penyajian laporan keuangannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP
2	Raven Pardomuan Siagian, Sifrid S. Pangemanaan, ISSN 2303-1174	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sult Go.	Hasil penelitian dari Koperasi Karyawan-PT Bank Sult Go mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Adapun hal-hal yang membuat koperasi ini memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu sendiri dan kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Eva Malina Simatupang (Jurnal Akuntansi Barelang Vol.3 No1 tahun 2018)	Analisis Penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar	Hasil analisis dan penelusuran terhadap KPN SMP N 7 P. Siantar mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP diperoleh kesimpulan bahwa: 1.Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar belum sesuai dengan SAK ETAP. 2.Jenis dan format laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar hanya sebatas Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi)
4	Rika Ikawati, Budi Tri Raharjo (Jurnal akuntansi dan bisnis Vol 5 No 1 tahun 2018)	Evaluasi perlakuan akuntansi atas pendapatan bunga dan pinjaman bunga pada laporan keuangan Kopdit (CU) Ngudi Rahayu berdasarkan Permen KUKM No. 13/PER.M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP	Hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan Kopdit Ngudi Rahayu serta berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan pendapatan bunga dan pinjaman bunga pada Kopdit Ngudi Rahayu telah dicatat sesuai dengan pos masing-masing. Pendapatan bunga dicatat dalam pos pendapatan, sedangkan pinjaman bunga dicatat sebagai biaya yang disajikan dalam laporan hasil usaha. Konsep yang digunakan dalam pencatatan transaksi telah sesuai dengan konsep yang digunakan berdasarkan atura PERMEN dan SAK ETAP yaitu secara akrual, artinya transaksi diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi.
5	Dini Adelia Agustine, Siti Rosyafah, Widya Susanti (Jurnal akuntansi UBHARA ISSN : 2460-	Analisis piutang tak tertagih terhadap tingkat perputaran piutang Kopwan Dewi Sri Candipari Porong	<i>Recaivable turnover, average collection period</i> , dan rasio penagihan menunjukkan fluktuasi dimana penurunan RTO bearti kenaikan bagi ACP itu menunjukkan bahwa jangka waktu penagihan yang dilakukan manajemen koperasi kurang efektif dan efsien. Sedangkan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	7762)		penurunan rasio penagihan menunjukkan aktifitas upaya penagihan yang dilakukan koperasi tidak baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Ditetapkan kerangka pemikirann sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tabel Kerangka Pemikirann



